

DAKWAH DAN POLITIK: MENAKAR KONTRIBUSI ORGANISASI ISLAM SAYAP PARTAI POLITIK BAGI MASYARAKAT MUSLIM YOGYAKARTA

Ahmad Asroni, Muhammad Yusup, dan Adib Sofia*

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
surel: ahmad.asroni@gmail.com, ymuhammad77@yahoo.com,
afi_sofia@yahoo.com

Abstrak

Seperti telah menjadi tradisi, menjelang Pemilu tak sedikit partai politik di Indonesia ramai-ramai mendirikan organisasi Islam. Dua dari sekian banyak partai politik yang mendirikan organisasi Islam sayap partai politik (parpol) adalah Partai Golkar dengan mendirikan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI)

* Ahmad Asroni adalah staf peneliti di Tolerance Institute, Yogyakarta. Muhammad Yusup dan Adib Sofia adalah dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

dan Pengajian Al-Hidayah serta PDI-P dengan membentuk Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Setidaknya ada lima kontribusi organisasi Islam sayap parpol bagi masyarakat, yaitu: menambah pengetahuan keagamaan masyarakat, menggerakkan masyarakat untuk senantiasa berbuat baik, menambah ketrampilan, melatih dan memberi kesempatan berorganisasi, serta memperkuat rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Sementara dalam konteks parpol, berbagai program kerja dan aktivitas keagamaan yang organisasi Islam sayapnya berfungsi untuk menjaga loyalitas simpatisan kepada parpol, mengukur kekuatan parpol dari segi perkembangan jumlah simpatisan, menjaga citra baik parpol, dan menepis stigma parpol non-religius. Selain itu, keberadaan organisasi Islam sayap parpol acapkali dimanfaatkan secara personal oleh fungsionaris partai politik yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan pimpinan eksekutif. Penelitian ini menemukan bahwa dakwah yang dilakukan organisasi sayap parpol dilakukan dengan setengah hati. Kegiatan-kegiatan mereka tampak semarak hanya menjelang Pemilu. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi utama organisasi Islam sayap parpol hanya untuk membentuk pencitraan guna meraih simpati umat Muslim.

Kata Kunci: Politik Islam, MDI, Pengajian Al-Hidayah, Bamusi

A. Pendahuluan

Memperbincangkan relasi agama dan politik memang senantiasa menarik. Hubungan antara keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait berkelindan. Politik tak kedap dari pengaruh agama. Begitu pula sebaliknya, agama tidak jarang dijadikan objek politik (baca: politisasi) demi merengkuh kekuasaan. Perselingkuhan agama dan kekuasaan ini dapat dilihat dalam sejarah negara-negara di dunia, baik negara-negara Islam maupun negara-negara non-Islam. Dalam konteks Indonesia, Islam sebagai agama yang paling besar dianut oleh masyarakat tentu saja akan banyak menjadi incaran empuk berbagai parpol dan para politisi. Sebagai kelompok mayoritas

di negeri ini, umat Islam merupakan aset politik yang strategis. Siapa yang sukses mengambil hati mayoritas umat Muslim, sudah dapat dipastikan ia bakal memegang tampuk kekuasaan. Karena itu, bukan menjadi sesuatu yang mengherankan apabila umat Muslim pada setiap pemilu menjadi rebutan banyak parpol dan para politisi.

Akibatnya, Islam akan kian rentan untuk dipolitisasi. Praktik politisasi Islam bukanlah omong kosong belaka. Praktik ini banyak ditemui dan menghiasi percaturan politik tanah air. Buktinya, masih banyak dijumpai partai politik (terutama partai politik berbasis Islam) pada setiap masa kampanye yang sengaja menggunakan jargon dan simbol-simbol keislaman untuk memikat hati kalangan Muslim.¹ Telah menjadi rahasia umum, untuk menarik simpati umat Muslim dan mendulang suara dari kalangan Muslim, tidak sedikit partai politik, baik partai politik Islam, partai politik yang berbasis organisasi Islam maupun partai politik yang berideologi nasionalis, ramai-ramai mendirikan organisasi-organisasi Islam sayap partai politik (parpol). Sebut saja misalnya Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) memiliki Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Partai Gerindra memiliki Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira). Partai Demokrat mempunyai Majelis Dzikir SBY. Demikian pula partai Golongan Karya (Golkar) yang mendirikan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) untuk jamaah Pria dan Al-Hidayah untuk jamaah perempuan.

Sebenarnya wajar-wajar saja dan tidak salah –dan mesti didukung— tatkala sejumlah partai politik mendirikan organisasi Islam sepanjang tujuannya itu sungguh-sungguh untuk kemaslahatan umat Muslim. Namun, akan menjadi salah dan bermasalah tatkala parpol-parpol tersebut hanya memanfaatkan organisasi buatannya sekadar sebagai alat politik untuk mendulang suara umat Muslim serta mengabaikan etika keislaman dan prinsip-prinsip demokrasi. Untuk melihat apakah keberadaan organisasi-organisasi Islam sayap parpol tersebut betul-betul memberikan kemaslahatan bagi umat Islam atau tidak, diperlukan penelitian yang mendalam, kritis, dan

¹ Ahmad Asroni, "Agama di Tepi Kekuasaan", dalam Gugun El-Guyanie, dkk., *Kekuasaan dan Agama* (Purwokerto: Obsesi Press-Grafindo Litera Media, 2009), hal. 60.

komprehensif. Berangkat dari kegelisahan akademik itulah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji fenomena munculnya lembaga-lembaga keislaman yang didirikan parpol.

Berangkat dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apa saja aktivitas-aktivitas keagamaan dan program kerja yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam sayap partai Golkar dan PDIP? Kedua, apa kontribusi yang telah diberikan oleh organisasi-organisasi Islam sayap partai Golkar dan PDI-P bagi umat Muslim? Ketiga, apa saja manfaat keberadaan organisasi-organisasi Islam sayap partai Golkar dan PDI-P terhadap pengembangan partai politik yang bersangkutan?

Menurut Ralph Turner dan Lewin Killian, gerakan sosial (*social movement*) dapat dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah gerakan yang berorientasi nilai (*value-oriented movement*). Kategori ini dicirikan dengan komitmen para anggotanya terhadap suatu prinsip yakni menolak segala bentuk kompromi demi satu tujuan yang dicita-citakan. kategori kedua adalah gerakan yang berorientasi pada kekuasaan (*power-oriented movement*) yang tujuan utamanya adalah mendapatkan kekuasaan, status, dan pengakuan bagi para anggota gerakan tersebut. Kategori ketiga adalah gerakan yang berorientasi pada partisipasi (*participation-oriented movement*) yang hanya menyuarakan adanya kekurangan dalam masyarakat, tetapi tidak berusaha aktif menghilangkan kekurangan tersebut.² Dalam kategori kedua itulah, organisasi-organisasi Islam sayap politik partai dapat dilihat. Organisasi-organisasi Islam besutan parpol tersebut agaknya lebih merupakan strategi parpol untuk menarik simpati dan mendulang suara umat Muslim.

Fenomena merebaknya pendirian organisasi-organisasi Islam oleh partai politik sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Kehadirannya telah lama ada yakni sejak era Orde Baru, tepatnya pada Golongan Karya. Langkah yang dilakukan parpol-parpol dengan mendirikan organisasi-organisasi Islam sayap partai dapat dikatakan cukup taktis. Apalagi, pemilih Muslim tak selalu menjatuhkan pilihan

² Ralp Turner & Lewis Killian, *Collective Behavior* (New York: Prentice Hall, 1957).

ke partai Islam. Bahkan, sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia, persentase pilihan umat Muslim terhadap parpol Islam tak pernah mencapai 50%. Artinya, pasar pemilih Islam masih terbuka lebar untuk diambil oleh partai politik non-Islam. Pada Pemilu 1999 misalnya, total suara partai Islam ditambah partai berbasis Islam — Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)— sebanyak 37,61%. Sementara dalam Pemilu 2004, total pemilih partai Islam dan partai berbasis Islam (PAN dan PKB) sebanyak 34%.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2007 yang menunjukkan bahwa sebanyak 13% responden merasa dekat dengan partai sekuler dan sebanyak 5% merasa dekat dengan partai berbasis ormas Islam. Kondisi yang sama terjadi di responden yang merasa dekat dengan partai berplatform Islam, yakni sebanyak 5% responden. Pada bagian lain, ditemukan sebanyak 78,4% responden yang berpendapat bahwa demokrasi sejalan dengan Islam. Perebutan konstituen Islam oleh partai politik menurut Azyumardi Azra merupakan hal yang lumrah sekaligus strategis bagi parpol. Lebih lanjut menurutnya, politisasi agama tidak dapat dihindari, terlebih dalam konteks politik di Indonesia. Kendati demikian, pendirian sayap organisasi keagamaan dalam partai politik tak bakal memiliki dampak politik apapun apabila organisasi tersebut hanya menjadi pelengkap unsur keagamaan saja. Nilai-nilai perjuangan aspirasi umat beragama kerap kali absen dari perdebatan partai politik.³

Ketika agama hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan, maka agama akan sangat rentan terhadap manipulasi. Apabila hal ini yang terjadi, maka konsistensi terhadap simbol agama akan sulit ditemukan, saat konteks dan lingkungan sosial-politik berubah. Perubahan konteks sosial-politik dapat mengakibatkan keterikatan seseorang terhadap simbol-simbol agama juga berubah. Hal ini bak produk susu yang memiliki kemasan berbeda dan berubah-

³ <http://www.inilah.com>, "Gerindra Mencuri Suara Muslim", <http://www.inilah.com/berita/2009/03/14/90575/gerindra-mencuri-suara-Muslim/>. Diakses pada 25 Maret 2010.

ubah. Bila kemasan tidak laku, ia akan diganti dengan kemasan baru yang lebih menarik.⁴

Oleh karena itu, setiap kegiatan politik termasuk pendirian organisasi-organisasi Islam sebagai sayap parpol mestinya didasarkan pada nilai-nilai moralitas agama. Dalam konteks Islam, menurut M. Amien Rais, politik mestinya berfungsi sebagai alat dakwah yang senantiasa *committed* kepada Allah. Tujuannya bukanlah semata-mata untuk memperoleh kekuasaan, tetapi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yakni pengabdian kepada Allah. Lebih lanjut menurutnya, suatu tindakan politik adalah baik jika ia berguna bagi seluruh rakyat sesuai dengan ajaran *rahmatan lil 'alamîn*.⁵

Hampir senada dengan M. Amin Rais, Ketua Umum PP Muhammadiyah, M. Dien Syamsuddin mengemukakan bahwa politik harus dipahami sebagai faktor instrumental untuk kontekstualisasi cita-cita sosial Islam ke dalam cita-cita nasional. Karenanya, politik dapat diperankan dengan berbagai cara untuk pencapaian tujuan tersebut demi pembangunan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah ridha Allah SWT.⁶

Sementara itu, Mahdi Bahar dalam artikelnya yang berjudul "Agama dan Kekuasaan" mendefinisikan kekuasaan yang ideal sebagai kekuasaan yang dapat meneguhkan agama yang diridhai Tuhan untuk kehidupan manusia. Karena itu, kekuasaan yang diperoleh hendaknya bertujuan utama menyembah kepada Tuhan.⁷

Penelitian ini mengungkap strategi partai politik terhadap masyarakat beragama, lebih tepatnya masyarakat Muslim di Indo-

⁴ Muhammad Ali, "Kemasan Agama demi Kekuasaan", *Kompas*, 5 Agustus 2003.

⁵ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1995), hal. 29-30.

⁶ M. Dien Syamsuddin, "Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama: Mengikhtiarkan Wawasan sosial-Politik Baru", dalam Abdurrahman Wahid, dkk, *Muhammadiyah dan NU: Reorientasi Wawasan Keislaman*, Yunahar Ilyas, dkk. (ed.), (Yogyakarta: LPPU UMY, LKPSM NU&PP Al-Muhsin, 1993), hal. 101.

⁷ Mahdi Bahar, "Agama dan Kekuasaan", *Serambi Indonesia*, 6 Desember 2008.

nesia. Berkaitan dengan munculnya kecenderungan partai politik untuk mengambil keuntungan politis dari masyarakat dengan identitas agama, sangat tepat kiranya untuk mempertimbangkan pendapat David C Barker dan Christopher Carman yang menuturkan bahwa masyarakat dengan acuan moral tertentu, termasuk masyarakat agamis, senantiasa menjadi ladang yang dibidik para politisi dalam menggalang suara. David C Barker dan Christopher Carman menegaskan bahwa kekuatan politik di dalam negara yang memiliki acuan moral tertentu akan cenderung memilih sikap yang berpihak pada komunitas masyarakat bermoral daripada kepada sikap pemerintah maupun sikap individu. Artinya, masyarakat dan acuan moral yang dianut masyarakat adalah fokus utama yang akan selalu diperhatikan oleh partai politik. Dalam hal ini masyarakat mayoritas Muslim dan acuan moral mereka yaitu agama Islam, sampai kapanpun akan menjadi perhatian setiap partai politik. Selain itu, David C Barker dan Christopher Carman juga menambahkan bahwa agama memiliki posisi sentral dalam masyarakat tersebut.⁸

Berkaitan dengan loyalitas masyarakat terhadap partai politik, penting kiranya memperhatikan pandangan Crewe dan Denver yang menyebut loyalitas tinggi sekelompok orang terhadap suatu partai dengan istilah *partisan exclusivism*. Orang-orang yang memiliki kecenderungan *partisan exclusivism* tergolong stabil, loyal dan enggan berpindah ke partai lain sebab kepercayaan terhadap partai yang diidolakan sudah sangat kuat.⁹ Meskipun munculnya *partisan exclusivism* adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal, namun harus pula dicermati perkembangan masyarakat demokrasi yang sudah semakin dewasa berpolitik, terutama mereka yang sudah berpendidikan dan cakap dalam mengakses informasi. Menurut Dalton & Wattenberg, kecenderungan munculnya *partisan exclusivism* semakin menurun ketika masyarakat (tradisional) sudah beranjak

⁸ David C Barker and Christopher Carman, 'Political Geography, Church Attendance, and Mass Preferences Regarding Democratic Representation', *Journal of Elections, Public Opinion & Parties*, 19: 2 January 2009, hal. 129.

⁹ Ivor Crewe & David Denver (eds) *Electoral Change in Western Democracies: Patterns and Sources of Volatility*, (London: Croom Helm, 1985).

menjadi masyarakat demokratis kontemporer di mana arus informasi sudah sangat membantu mereka untuk bersikap kritis.¹⁰

Penelitian ini melibatkan dua organisasi Islam sayap parpol di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yakni Bamusi milik PDI-P serta Majelis Dakwah Islamiyah dan Al-Hidayah milik partai Golkar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif.

Adapun teknik untuk menggali data lapangan sebagai pendukung penelitian digunakan beberapa metode. Pertama, metode observasi tepatnya metode *non-participant observer*, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung, melainkan mengamati dengan seksama terhadap objek penelitian.¹¹ Dalam konteks ini, peneliti akan mengamati segenap kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi Islam sayap parpol di DIY. Kedua, wawancara. Wawancara ditujukan kepada pengurus organisasi-organisasi Islam sayap partai politik, konstituen parpol, masyarakat luas, dan pihak-pihak yang relevan dengan penelitian. Secara lebih spesifik, wawancara bertujuan untuk mengetahui pandangan anggota parpol dan masyarakat luas terhadap eksistensi dan kontribusi organisasi-organisasi Islam sayap parpol yang menjadi objek dalam penelitian ini. Interview dilakukan dengan *structured interview*, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas tanpa pertanyaan tertulis. Namun demikian, peneliti tetap berpedoman pada *interview guide* yang telah disusun sebelumnya. Ketiga, metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian berupa dokumentasi yang berasal dari organisasi-organisasi Islam sayap parpol yang dijadikan objek penelitian.

Adapun analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data. Setelah itu, peneliti akan melakukan seleksi, sehingga bisa ditentukan data mana yang bisa masuk dalam kerangka konseptual tulisan dan mana yang harus disisihkan. Selanjutnya, data tersebut difokuskan

¹⁰ Russell Dalton, J. & Martin P. Wattenberg, (eds), *Parties Without Partisans* (Oxford: Oxford University Press, 2000).

¹¹ David Silverman, *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text, and Interaction* (London: Sage Publication, 1993), hal. 31.

sehingga hasilnya adalah sebuah abstraksi yang terarah dan mengena dengan kajian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti sedikit banyak terlibat memberi penafsiran yang bermaksud menjelaskan data yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak disajikan sekadar deskriptif saja, akan tetapi disertai analisis yang merupakan interpretasi peneliti sehingga data yang telah diorganisasikan tadi memiliki makna yang mudah dipahami.

Langkah-langkah di atas mengacu pada Miles & Haberman sebagaimana dikutip oleh Moh. Soehadha bahwa analisis data mencakup tiga sub proses, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data.¹² Untuk menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis. Penggunaan pendekatan sosiologis menurut peneliti tepat lantaran penelitian ini hendak mengungkapkan relasi sosiologis antara lembaga sosial keagamaan dengan masyarakatnya. Dalam konteks ini adalah meneropong ada tidaknya kontribusi atau manfaat yang diberikan organisasi-organisasi Islam sayap parpol bagi umat Muslim.

B. Program Kerja dan Aktivitas Keagamaan Organisasi-organisasi Islam Sayap Parpol PDI-P dan Partai Golkar

1. Majelis Dakwah Islamiyah (MDI-Partai Golkar)

Ada beberapa program kerja dan aktivitas keagamaan yang telah dilakukan oleh Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Propinsi DIY milik Partai Golkar. Program kerja dan aktivitas-aktivitas keagamaan MDI Propinsi DIY tersebut antara lain pengajian, peringatan hari-hari besar Islam, pelatihan dai dan daiyah, pelatihan manajemen dakwah, bimbingan dan penyuluhan rohani, bakti sosial dan kesehatan, pelatihan kewirausahaan di pondok-pondok pesantren, pelatihan keterampilan, bantuan kepada daerah yang terkena bencana,

¹² Moh. Soehadha, *Pengantar Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hal. 21.

pemberian beasiswa, buka puasa bersama, penanggulangan masalah remaja, terawih keliling, bazar sembako murah, dan lain sebagainya.

Menurut Hariyadi, Ketua DPD Tingkat I MDI Propinsi DIY, ada beberapa program kerja rutin dan sedang diselenggarakan MDI yaitu: Pertama, pendidikan dai-dai muda yang dilakukan oleh Angkatan Muda MDI (AMMDI). Kedua, menagadakan teraweh keliling. Ketiga, konsolidasi organisasi yakni pembentukan AMMDI, Korps Perempuan MDI (KPMMDI), pembentukan DPD MDI beberapa Kabupaten di DIY, yaitu: DPD MDI Bantul, Kulon Progo, dan Sleman.

Selain program-program tersebut, program lain yang secara reguler berjalan adalah pengajian yang bertempat di Kabupaten Kulon Progo setiap Senin malam. Penceramahnya berasal dari kalangan internal MDI sendiri. Baginya, MDI merupakan organisasi kumpulan orang-orang yang paham tentang Islam atau terminologi lucunya adalah kumpulan kyai atau ustad-ustad partai Golkar.¹³ Apa yang diungkapkan oleh Hariyadi sama seperti yang dikatakan oleh Sudarto, mantan pimpinan teras DPD I partai Golkar Propinsi DIY yang mengemukakan bahwa para penceramahnya selama ini berasal dari internal MDI saja.¹⁴

Dari seabrek program kerja MDI yang dipaparkan di atas, ternyata tidak banyak program kerja yang dapat direalisasikan. Menurut pengakuan Hariyadi, hal tersebut disebabkan oleh ketiadaan dana yang dimiliki MDI.¹⁵

2. Pengajian Al-Hidayah (Partai Golkar)

Sama halnya dengan MDI, dari seabrek program kerja Pengajian Al-Hidayah yang dipaparkan di atas, ternyata tidak banyak program kerja yang dapat direalisasikan. Menurut pengakuan Maskanah, Ketua DPD Tingkat I Pengajian Al-Hidayah Propinsi DIY, hal tersebut disebabkan oleh ketiadaan dana yang dimiliki Pengajian Al-Hidayah. Ia menuturkan bahwa dari sekian banyak program yang digariskan Pengajian Al-Hidayah yang paling rutin adalah pengajian

¹³ Wawancara dengan Hariyadi, 12 Oktober 2010.

¹⁴ Wawancara dengan Sudarto, 2 Oktober 2010.

¹⁵ Wawancara dengan Hariyadi, 12 Oktober 2010.

ibu-ibu. Waktu pelaksanaan pengajian ibu-ibu antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda, ada yang satu minggu sekali dan ada juga yang satu bulan sekali. Tempatnya pun berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti di Keraton.

Ia menceritakan bahwa pasca tumbanganya Orde Baru (awal-awal masa reformasi), banyak orang yang takut menghadiri pengajian ibu-ibu yang diselenggarakan Pengajian Al-Hidayah. Ketakutan tersebut terkait dengan citra negatif partai Golkar sebagai partai penyokong Orde Baru yang dianggap sebagian masyarakat memiliki andil yang besar dalam melanggengkan rezim otoriter Orde Baru.

Sejak itu, nama pengajian ibu-ibu tidak bertajuk lagi sebagai pengajian ibu-ibu Al-Hidayah. Nama pengajian berganti dengan beraneka nama seperti pengajian Al-Masyitoh, pengajian Minggu Kliwonan, pengajian Jumat Legian, pengajian Jumat Pahingan, dan lain-lain. Namun demikian, penyelenggara atau pengelola tetaplah dari pengurus Pengajian Al-Hidayah. Bahkan menurut pengakuan Maskanah, pada awal reformasi banyak jamaah yang tidak mau lagi mengikuti pengajian karena mengalami ketakutan. Seiring dengan waktu, pada masa sekarang nama pengajian kembali menggunakan nama pengajian ibu-ibu Al-Hidayah atau kalaupun menggunakan nama-nama, penyelenggara pengajian secara terang-terang berani berterus terang berasal dari Pengajian Al-Hidayah.

Lebih lanjut menurutnya, pengajian ibu-ibu yang diselenggarakan Pengajian Al-Hidayah terbuka untuk umum tanpa memandang latar belakang partai politik dan sosial keagamaan seseorang. Pengajian ibu-ibu yang diselenggarakan Pengajian Al-Hidayah sama sekali tidak pernah menyinggung masalah politik dan tidak meminta para jamaahnya untuk memilih partai Golkar dan calon anggota legislatif atau calon pemimpin eksekutif (presiden, gubernur, bupati, dan lain sebagainya) dari partai Golkar. Pengajian ibu-ibu Al-Hidayah biasanya dihadiri rata-rata 70 (tujuh puluh) orang.

Ia menuturkan bahwa Pengajian Al-Hidayah juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak lain, namun pada umumnya hanya terbatas pada hal-hal yang terkait pengajian ibu-ibu saja. Bentuk pengajiannya adalah ceramah dengan mengundang ustad, baik dari

dari internal (ustad dan ustadah Partai Golkar) maupun ustad dan ustadah dari luar semisal dari Kementerian Agama.

Sementara mengenai dana untuk berbagai kegiatan yang dilakukan Pengajian Al-Hidayah sebagian dibiayai oleh partai Golkar dan sebagian lagi oleh para jamaahnya. Partai Golkar tidak mengalokasikan dana secara rutin untuk Pengajian Al-Hidayah. Maskanah mengemukakan bahwa kendala paling besar yang dihadapi Pengajian Al-Hidayah adalah masalah dana. Selain dari jamaah dan Partai Golkar, dana Pengajian Al-Hidayah dapat dari kantong pribadi seperti dari tokoh-tokoh elit partai Golkar dan fungsionaris partai Golkar yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan kandidat kepala atau wakil kepala daerah.¹⁶

3. Baitul Muslimin Indonesia (PDI-P)

Sama halnya seperti MDI dan Pengajian Al-Hidayah, Bamusi memiliki beberapa program kerja dan aktivitas keagamaan. Di antaranya adalah pengajian, bakti sosial, pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu dan anak-anak jalanan, dan lain-lain. Bahkan selama bulan Ramadhan, Bamusi mengadakan rangkaian kegiatan keagamaan seperti buka puasa bersama dan diskusi keagamaan. Barangkali yang membedakan antara Bamusi dengan MDI dan Al-Hidayah adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bamusi terkesan insidental dan tidak dilakukan secara reguler.

Di level pusat, Bamusi menjelang Pemilu Presiden tahun 2009 misalnya telah meminta fungsionaris Bamusi di daerah-daerah, tak terkecuali Bamusi DIY yang menjadi caleg untuk mengakses komunitas Islam dan lembaga pendidikan Islam. Pengurus Bamusi yang bukan calon legislatif juga didorong untuk memperkuat tim jurkam (juru kampanye). Bahkan, Hamka Haq, Ketua Umum Pengurus Pusat Bamusi, menceritakan, Pengurus Pusat Bamusi pada tahun 2008 telah memperbanyak teks khutbah peringatan Idul Adha dalam bentuk buku saku. Teks itu memasukkan sejumlah pemikiran Bung Karno mengenai pemahaman keislaman yang menyejukkan dan pentingnya kemandirian ekonomi.

¹⁶ Wawancara dengan Maskanah, 2 Oktober 2010.

Menariknya, sejak awal 2008 Bamusi telah mengedarkan seratus ribu piagam kepemimpinan perempuan. Teks itu berisi lima poin yang menegaskan syariat Islam membenarkan perempuan menjadi pemimpin. Hal ini dilakukan lantaran pada Pemilu Presiden 2009 PDI-P mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Sejak berdiri, Bamusi berhasil membangun sejumlah tradisi baru di PDI-P semisal memfasilitasi pelaksanaan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha serta menerbitkan buletin Jumat dan mendirikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS).¹⁷ Materi buletin Jumatan Bamusi selain mendiskusikan wacana keislaman, isinya juga acapkali dikaitkan dengan isu sosial kontemporer.¹⁸

Sementara di level DIY, Bamusi juga telah banyak menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya seperti pengajian, pelatihan penggemukan sapi bagi para santri pondok pesantren, bazar sembako murah, buka puasa bersama, pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu, dialog keagamaan, dan lain sebagainya. Selain sebagai wujud kepedulian terhadap nasib “wong cilik”, semua kegiatan yang dilakukan Bamusi DIY bertujuan untuk mengampanyekan PDI-P kepada masyarakat sebagai partai nasionalis yang religius. Hal ini diakui oleh Pramono Anung, mantan Sekjen DPP PDI-P yang mengemukakan bahwa Bamusi merupakan organisasi sayap parpol PDI-P yang menampung kader Muslim nasionalis, sehingga kesan PDI-P sebagai partai abangan dapat dihapus.¹⁹ Pernyataan Pramono Anung ini juga diakui oleh Priyanto, mantan Ketua Formatur Bamusi Propinsi DIY dan juga diamini oleh Hari Asmara, salah seorang fungsionaris DPP PDI Provinsi DIY.²⁰

¹⁷ *Jawa Pos*, 17 Maret 2009, “Geliat Parpol Nasionalis Menggarap Segmen Pemilih Muslim”.

¹⁸ <http://www.inilah.com>, “Gerindra Mencuri Suara Muslim”, <http://www.inilah.com/berita/2009/03/14/90575/gerindra-mencuri-suara-muslim/>. Diakses pada 25 Maret 2010.

¹⁹ *Suara Merdeka*, 28 Juli 2007, “Dideklarasikan Bamusi dan BMI”.

²⁰ Wawancara dengan Priyanto dan Hari Asmara pada 8 Oktober 2010.

C. Kontribusi Organisasi-organisasi Islam Sayap Partai Golkar dan PDI-P bagi Masyarakat Islam

Eksistensi dan kegiatan organisasi-organisasi Islam sayap parpol tentunya memberikan manfaat bagi partai yang bersangkutan. Setidaknya ada empat manfaat yang dapat diperoleh partai, yaitu: organisasi-organisasi Islam sayap parpol berperan menjaga loyalitas simpatisan kepada partai, mengukur kekuatan partai dari segi perkembangan jumlah simpatisan, menjaga citra baik partai di mata masyarakat dengan cara melakukan program yang baik, serta menepis stigma partai non-religius.

Simpatisan partai perlu dijaga loyalitasnya sebab dalam masyarakat demokratis, rakyat diberikan kemerdekaan untuk berpindah partai sesuai minat dan keyakinannya. Maka sangat dimungkinkan kader dan simpatisan partai beralih ke partai lain jika loyalitas mereka terhadap sebuah partai melemah atau hilang sama sekali. Untuk mencegah kemungkinan ini, biasanya partai memiliki langkah-langkah strategis. Berbagai upaya dilakukan, baik di tubuh partai maupun di organisasi-organisasi sayap yang dimiliki.

MDI dan Pengajian Al-Hidayah sebagai organisasi Islam sayap partai Golkar sesungguhnya juga berfungsi untuk menjaga loyalitas kader dan simpatisan tersebut. Meskipun tidak secara terbuka mengungkapkan maksud yang demikian, namun tujuan menjaga loyalitas kader dan simpatisan ini juga tidak dipungkiri. Hal demikian diungkapkan oleh Maskanah. Sebagaimana peneliti telah sekelumit ungkapkan di atas, Maskanah mengungkapkan bahwa Pengajian Al-Hidayah bersifat otonom dan independen dalam arti bahwa kegiatannya bisa diikuti oleh siapa saja termasuk mereka yang bukan simpatisan dan kader partai Golkar.²¹ Namun demikian, sebagai organisasi yang para pengurusnya adalah wanita partai Golkar, maka keinginan untuk menjaga loyalitas simpatisan terhadap partai Golkar tentu juga ada di benak para pengurusnya. Dengan demikian, sedikit banyak organisasi-organisasi Islam sayap parpol ini berperan dalam menjaga simpatisan dan kader.

²¹ Wawancara dengan Maskanah pada 2 Oktober 2010.

Selain itu, organisasi-organisasi Islam sayap parpol juga berperan mengukur kekuatan partai, meskipun ukuran ini masih secara kasar. Dalam arti bahwa data simpatisan dan kader yang dimiliki saat ini memang belum tentu sama dengan jumlah pemilih dalam masa pemilu. Namun setidaknya kuantitas keterlibatan simpatisan dan kader dalam organisasi sayap cukup bisa digunakan untuk memprediksi kekuatan partai. Jika organisasi sayap mampu merekrut banyak anggota dan kemudian memberikan pengaruh positif bagi mereka. Maka organisasi ini akan mendapatkan respons yang baik dari masyarakat. Respons yang baik ini merupakan sinyal keberhasilan organisasi sayap sekaligus keberhasilan partai. Semakin banyak orang yang terlibat dan puas dengan program kerja organisasi sayap, maka harapan akan meningkatnya jumlah simpatisan menjadi cukup beralasan. Maka fluktuasi dan dinamika yang terjadi di Pengajian Al-Hidayah ini juga dapat dijadikan gambaran awal tentang kekuatan massa yang dimiliki partai Golkar serta dapat dijadikan prediksi untuk mengukur kekuatan suara yang nantinya diperoleh di masa Pemilu.

Fungsi yang ketiga, organisasi-organisasi Islam sayap parpol juga bermanfaat bagi partai untuk menjaga citra baik partai di mata masyarakat dengan cara melakukan program yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat masih menilai partai berdasarkan kinerja dan komitmennya membela rakyat. Program-program yang populis selalu menjadi andalan partai manapun untuk merebut hati rakyat. Tidak hanya tubuh partai yang melakukan program pro-rakyat itu, namun juga organisasi sayap. Sebagai organisasi sayap yang berorientasi keagamaan sebagaimana peneliti singgung di muka, Pengajian Al-Hidayah tidak hanya melakukan program-program yang terkait keagamaan, namun juga program bakti sosial dan edukasi masyarakat atau pengembangan ketrampilan. Program-program ini sedikit banyak menambah citra baik organisasi sayap sekaligus citra partai Golkar di mata masyarakat.

Fungsi keempat, eksistensi organisasi Islam sayap parpol bermanfaat dalam menepis stigma negatif partai. Dalam konteks ini, MDI dan Pengajian Al-Hidayah sangat efektif untuk difungsikan sebagai *avant garde* dalam membendung stigma non-religius yang

potensial dilekatkan pada partai Golkar selama ini. Sebagai partai berbasis nasionalis, tentu bukan stigma religius yang melekat pada partai Golkar, namun stigma liberal. Dengan kata lain, partai Golkar potensial untuk dicitrakan sebagai “partainya orang yang kurang religius”. Sedangkan partai-partai berbasis agama adalah partai yang diisi orang-orang religius. Menyadari hal itu, MDI dan Pengajian Al-Hidayah lantas diposisikan sebagai *counter attack* untuk menegaskan bahwa partai Golkar pun juga diisi oleh orang-orang yang religius. Hal itu dibuktikan dengan intensifnya program keagamaan yang dilakukan simpatisan partai Golkar dalam organisasi-organisasi Islam sayap parpolnya. Baik MDI maupun Pengajian Al-Hidayah sebagai organisasi Islam sayap parpol, memainkan peranan penting dalam hal tersebut.

Kedua organisasi Islam sayap partai Golkar ini berkontribusi dalam mengikis anggapan non-religius yang dilekatkan pada partai Golkar. Menurut Maskanah, Pengajian Al-Hidayah mampu menampilkan Islam yang “biasa saja” di tengah menyeruaknya “Islam ekstrim” yang banyak meresahkan masyarakat, dan bahkan yang menghinggapi partai tertentu.²² Setali dua uang dengan Pengajian Al-Hidayah, MDI pun tampil dalam corak keislaman yang inklusif. Hal ini diutarakan oleh Haryadi yang mengemukakan bahwa MDI mempromosikan Islam moderat.²³

Selain keempat manfaat di atas, keberadaan organisasi Islam sayap partai acapkali dimanfaatkan secara personal oleh fungsionaris partai politik yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota dewan atau mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-wapres) serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bamusi sebagai organisasi Islam sayap partai PDI-P juga memainkan peran yang kurang lebih sama. Namun karena rendahnya intensitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bamusi, maka manfaat yang didapat PDI-P juga tidak sebanyak yang diperoleh oleh partai Golkar dengan MDI dan Pengajian Al-Hidayah-nya. Manfaat terbesar

²² Wawancara dengan Maskanah, 2 Oktober 2010.

²³ Wawancara dengan Haryadi, 12 Oktober 2010.

dan sangat diharapkan PDI-P adalah untuk menepis anggapan bahwa PDI-P merupakan partainya orang-orang yang tidak agamis. Dengan adanya Bamusi sebagai organisasi Islam sayap PDI-P, anggapan mirroring tersebut diharapkan dapat dikikis. Bamusi mencoba membuktikan bahwa agama dan nasionalisme adalah dua hal yang berjalan beriringan bahkan saling menopang. Dibentuknya Bamusi serta serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di berbagai kota, termasuk Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan citra PDI-P sebagai partai yang bersifat terbuka terhadap segala kalangan termasuk umat muslim yang menghendaki kehidupan berbangsa yang agamis. Menurut Priyanto, pada saat mengadakan kegiatan, Bamusi tidak pernah menyinggung masalah politik. Meskipun demikian, Priyanto dengan jujur mengakui bahwa PDI-P memiliki manfaat politik dari Bamusi, namun tidak secara langsung dan terang-terangan.²⁴

D. Menimbang Perhatian Organisasi-organisasi Sayap Parpol terhadap Dakwah Islam

Melalui penelitian terhadap organisasi-organisasi sayap parpol, baik PDI-P maupun Golkar ini ditemukan beberapa fakta yang dapat digunakan untuk menimbang keseriusan partai politik terhadap pengembangan dakwah Islam. *Pertama*, dengan mempertimbangkan pola keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan keislaman dari organisasi-organisasi Islam sayap parpol, ditemukan bahwa tujuan organisasi sayap melakukan kegiatan adalah mempertahankan dan memperluas basis massa. Tujuan utamanya bukan agenda dakwah Islam. Jika dilihat dari keterikatan masyarakat terhadap organisasi-organisasi Islam sayap parpol, maka masyarakat yang terlibat dalam kegiatan organisasi-organisasi Islam sayap parpol dapat dibagi menjadi tiga kelompok: (1) mereka yang merasa simpatik dengan parpol yang bersangkutan sehingga dengan senang hati mengikuti kegiatan organisasi sayap, meminjam terminologi Crewe & Denver mereka ini disebut *simpatisan exclusivism*;²⁵ (2) mereka

²⁴ Wawancara dengan Priyanto, 8 Oktober 2010.

²⁵ Ivor Crewe & David Denver (eds), *Electoral Change in Western Democracies: Patterns and Sources of Volatility* (London: Croom Helm, 1985).

yang mengikuti kegiatan organisasi-organisasi Islam sayap parpol namun pada awalnya tidak sadar sedang mengikuti kegiatan organisasi sayap parpol, mereka ini adalah bidikan baru bagi organisasi-organisasi Islam sayap parpol; (3) Mereka yang ingin terlibat dalam organisasi-organisasi Islam sayap parpol untuk menjadikannya sebagai kendaraan politik.

Kedua, partai politik kurang serius dalam mengoptimalkan fungsi organisasi sayap Islam parpol dalam dakwah Islam, sehingga kegiatan organisasi Islam sayap parpol menjadi fluktuatif atau naik turun. Penelitian ini menemukan fakta bahwa terdapat beberapa hal yang dikeluhkan organisasi-organisasi Islam sayap parpol yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Keluhan-keluhan tersebut secara tidak langsung menandakan rendahnya perhatian parpol terhadap organisasi-organisasi Islam sayap parpolnya. Beberapa keluhan tersebut di antaranya adalah: (1) kurangnya dukungan dana dari parpol kepada organisasi-organisasi Islam sayap parpol; (2) kurangnya koordinasi, kontrol, dan evaluasi dari parpol kepada organisasi-organisasi Islam sayap parpol; dan (3) rendahnya kinerja organisasi-organisasi Islam sayap parpol. Rendahnya perhatian parpol terhadap organisasi-organisasi sayap parpol sejatinya dapat menjadi bukti rendahnya perhatian parpol terhadap dakwah Islam.

Ketiga, kegiatan keislaman yang dilakukan organisasi-organisasi Islam sayap parpol ternyata tujuan utamanya adalah politik pencitraan yaitu untuk menghapus stigma negatif yang melekat pada partai dan untuk memperluas cakupan basis massa, bukan bertujuan untuk secara ikhlas berdakwah mengembangkan Islam. Dalam kasus Bamusi misalnya, fungsionaris PDI-P menyadari bahwa PDI-P selama ini lekat dengan sejumlah stigma. Di antaranya adalah: (1) PDI-P dianggap sebagai partai tempat berlindungnya sejumlah mantan aktivis PKI atau anak keturunan mantan aktivis dan simpatisan PKI; (2) PDI-P dianggap partai tempat bernaung orang-orang non-Muslim; (3) PDI-P adalah tempat bernaungnya orang-orang ras China/Tionghoa; (4) PDI-P dianggap sebagai partainya orang-orang Muslim abangan, sinkretis, dan takhayul. Partai Golkar juga mendapatkan label sebagai parpol non-religious. Keberpihakan partai Golkar kepada Islam masih patut dipertanyakan mengingat *platform* parpol

ini adalah partai nasionalis. Meskipun antara nasionalisme dan keagamaan bukanlah dua hal yang bertentangan, namun dalam konteks politik Indonesia *platform* nasionalis sering dilekatkan pada kekurang-berpihakan kepada agama. Setidaknya, partai nasionalis dianggap semata-mata berorientasi politik praktis dan tidak memberi perhatian lebih pada perkembangan keagamaan umat Islam. Partai Golkar sebagai pelanjut sejarah dari sebuah ormas yang mengukuhkan dominasi pemerintahan Orde Baru, masih dianggap tidak jauh beda dari pendahulunya. Menyadari hal tersebut, Baik partai Golkar maupun PDI-P sama-sama berupaya membangun citra sebagai parpol yang dekat dengan Islam, dengan harapan semakin banyak Muslim mau mengalihkan aspirasi politiknya ke partai-partai nasionalis yang juga mulai terkesan religius tersebut. Di negara manapun, masyarakat bermoral termasuk masyarakat agamis, senantiasa menjadi ladang yang dibidik para politisi dalam menggalang suara. Hal ini sejalan dengan pendapat David C. Barker dan Christopher Carman tentang kecenderungan parpol untuk menjadikan kelompok masyarakat beragama sebagai aset pendulangan suara.²⁶

E. Perbandingan Organisasi-organisasi Sayap Partai Golkar dan PDI-P

Berdasarkan pembahasan dalam beberapa bab di atas, organisasi-organisasi Islam sayap partai Golkar dan PDI-P dapat dikomparasikan dari beberapa aspek. *Pertama*, dari sisi kesungguhan parpol dalam mengembangkan organisasi-organisasi Islam sayap parpolnya, baik PDI-P maupun Golkar dinilai tidak sungguh-sungguh karena dukungan dana, kontrol dan evaluasi sangat kurang. *Kedua*, dari segi kesungguhan kerja organisasi-organisasi Islam sayap parpol ditemukan bahwa organisasi Islam sayap partai Golkar lebih memiliki kesungguhan kerja dibandingkan organisasi Islam sayap PDI-P. Hal itu setidaknya dapat dilihat dari dua hal, yaitu: matangnya perencanaan program kerja dan dari kontinuitas pelaksanaan kegiatannya.

²⁶ David C Barker & Christopher Carman, "Political Geography, Church Attendance, and Mass Preferences Regarding Democratic Representation", *Journal of Elections, Public Opinion & Parties*, 19: 2 January 2009, hal. 129.

Selain itu, meskipun terdapat perbedaan antara Bamusi, Pengajian Al-Hidayah dan MDI dalam pelaksanaan program, namun secara umum sebenarnya organisasi-organisasi Islam sayap parpol tersebut terbilang kurang berhasil dalam memenuhi target-target program yang telah ditetapkan.

Ketiga, dari sisi loyalitas pengikut dan penerimaan di masyarakat, MDI mengklaim memiliki peta kader yang loyal. Meskipun tidak memberikan data tertulis mengenai hal tersebut, MDI mengaku memiliki informasi yang valid dari sejumlah kader kunci di berbagai daerah. Sedangkan Pengajian Al-Hidayah mengakui meski masih memiliki sejumlah kader yang loyal, tetapi Pengajian Al-Hidayah merasakan kemerosotan yang cukup tajam berkaitan jumlah kader yang dimiliki. Sementara terkait loyalitas simpatisan Bamusi, kurang dapat dipastikan mengingat tidak adanya kegiatan yang secara reguler dilakukan.

Keempat, jika ditilik dari segmen masyarakat Muslim yang dibidik oleh organisasi-organisasi Islam sayap PDI-P dan partai Golkar, sebenarnya tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Bamusi membidik dua jenis masyarakat Muslim, yaitu Muslim tradisional dan Muslim modern yang inklusif sedangkan MDI dan Pengajian Al-Hidayah ternyata juga memiliki bidikan yang sama. Mereka mencoba merebut hati masyarakat akar rumput yang berislam “biasa saja”. Dalam arti bahwa mereka menolak gagasan penerapan syariat Islam sebagaimana sempat menjadi iming-iming politis sejumlah partai Islam.

Kelima, dari segi pandangan keislaman, organisasi-organisasi Islam sayap partai Golkar dan PDI-P tidak berbeda dengan pandangan keislaman parpol tempat menginduknya. Sebagai partai nasionalis, baik PDI-P maupun partai Golkar menekankan keislaman yang menerima keragaman, inklusif, kultural dan menolak Islam yang formalis, fundamentalis apalagi berbau kekerasan. Mereka menekankan penting fungsi agama sebagai pemersatu bangsa, bukan pemecah belah bangsa. Oleh karena itu, Islam yang dikehendaki oleh mereka adalah Islam yang dapat berperan dalam membangun nasionalisme. Islam yang dapat menimbulkan separatisme dan ego-kedaerahan hendaknya tidak diutamakan. Pengajian Al-Hidayah, MDI,

dan Bamusi juga menyayangkan munculnya daerah-daerah yang menggunakan perda syariat Islam.

F. Penutup

Bertitik tolak dari eksplanasi di atas, ada beberapa hal menarik yang dapat disimpulkan. *Pertama*, berbagai program kerja dan aktivitas keagamaan yang pernah dilakukan MDI, Pengajian Al-Hidayah dan Bamusi meliputi banyak hal dan hampir sama. Di antaranya adalah pengajian, peringatan hari-hari besar Islam, pelatihan dai dan daiyah, pelatihan manajemen dakwah, bimbingan dan penyuluhan rohani, bakti sosial dan kesehatan, pelatihan kewirausahaan di pondok-pondok pesantren, pelatihan keterampilan, bantuan kepada daerah yang terkena bencana, pemberian beasiswa, buka puasa bersama, terawih keliling, bazar sembako murah, pelatihan penggemukan sapi bagi santri pondok pesantren, dialog keagamaan., training menjahit dan lain-lain. Yang membedakan ketiga organisasi sayap parpol tersebut adalah jika program-program kerja dan aktivitas-aktivitas keagamaan yang dilakukan MDI dan Pengajian Al-Hidayah relatif terorganisasi dengan baik sementara Bamusi bersifat insidental dan tak terorganisasi dengan baik.

Kedua, berbagai program kerja dan aktivitas keagamaan memberikan manfaat bagi masyarakat. Setidaknya terdapat lima kontribusi organisasi-organisasi Islam sayap parpol bagi kemaslahatan masyarakat, yaitu: menambah pengetahuan keagamaan masyarakat, menggerakkan masyarakat untuk senantiasa berbuat baik, memberi tambahan ketrampilan, melatih dan memberi kesempatan berorganisasi, serta memperkuat rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Selain bermanfaat bagi masyarakat, berbagai program kerja dan aktivitas keagamaan yang dilakukan MDI, Pengajian Al-Hidayah, dan Bamusi tentu saja bermanfaat bagi partai yang bersangkutan. Setidaknya ada empat manfaat yang dapat diperoleh partai, yaitu: organisasi-organisasi Islam sayap parpol berperan menjaga loyalitas simpatisan kepada partai, mengukur kekuatan partai dari segi perkembangan jumlah simpatisan, menjaga citra baik partai di mata masyarakat dengan cara melakukan program yang baik, serta menepis stigma partai non-religius. Selain keempat manfaat di atas,

keberadaan organisasi Islam sayap partai acapkali dimanfaatkan secara personal oleh fungsionaris partai politik yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota dewan legislatif, presiden, dan kepala daerah. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah meskipun program-program kerja dan kegiatan keagamaan yang dilakukan MDI, Pengajian Al-Hidayah, dan Bamusi sama-sama memiliki kontribusi positif (bermanfaat), baik bagi masyarakat Muslim maupun bagi partai politik yang bersangkutan, namun keberadaan MDI dan Pengajian Al-Hidayah dapat dikatakan lebih berpengaruh dan lebih mengakar di tengah masyarakat Muslim Yogyakarta dibanding Bamusi. Hal ini disebabkan minimnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bamusi. Faktor lain yang menjadikan kegiatan Bamusi tidak begitu mengakar di hati masyarakat Muslim Yogyakarta –sebagaimana peneliti telah singgung berulang kali di muka— adalah karena kegiatan-kegiatan Bamusi bersifat sporadis dan bukan merupakan kegiatan-kegiatan yang relatif teratur seperti hal yang dilakukan MDI dan Pengajian Al-Hidayah. Karena rendahnya intensitas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Bamusi tersebut, maka manfaat yang didapat PDI-P juga tidak sebanyak yang diperoleh oleh partai Golkar dengan MDI dan Pengajian Al-Hidayah-nya.

Ketiga, dakwah Islam yang dilakukan partai Golkar dan PDI-P melalui organisasi Islam sayap parpolnya dilakukan dengan setengah hati mengingat perhatian partai terhadap keberlangsungan kegiatan dakwah Islam tersebut dinilai rendah. Hal tersebut terlihat dari rendahnya anggaran, kurangnya kontrol dan evaluasi serta tidak terlaksananya sejumlah program kerja organisasi Islam sayap parpol. Selain itu, dakwah Islam hanya dioptimalkan menjelang saat-saat penting dalam kalender politik, terutama menjelang Pemilu, baik Pemilu legislatif maupun Pemilu eksekutif (Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah). Hal ini sekaligus menandakan bahwa fungsi utama organisasi Islam sayap parpol adalah untuk membentuk pencitraan guna meraih simpati masyarakat Muslim. Pencitraan ini juga disadari sejumlah masyarakat yang diwawancarai dalam penelitian ini. Pencitraan dan pembentukan organisasi sayap berbasis keislaman yang dilakukan oleh partai adalah dalam rangka meraih dukungan masyarakat Muslim Indonesia yang jumlahnya sangat besar ini.

Daftar Pustaka

- Ahmad Asroni, "Agama di Tepi Kekuasaan", dalam Gugun El-Guanyie, dkk., *Kekuasaan dan Agama*, Purwokerto: Obsesi Press-Grafindo Litera Media, 2009.
- Barker, David C., & Christopher Carman, "Political Geography, Church Attendance, and Mass Preferences Regarding Democratic Representation", *Journal of Elections, Public Opinion & Parties*, 19: 2 January 2009.
- Crewe, Ivor & David Denver (eds), *Electoral Change in Western Democracies: Patterns and Sources of Volatility*, London: Croom Helm, 1985.
- Dalton, Russell J. & Martin P. Wattenberg (eds), *Parties Without Partisans*, Oxford: Oxford University Press, 2000.
- <http://www.inilah.com> HYPERLINK "http://www.inilah.com/", "Gerindra Mencuri Suara Muslim", <http://www.inilah.com/berita/2009/03/14/90575/gerindra-mencuri-suara-muslim/>. Diakses pada 25 Maret 2010.
- Jawa Pos*, 17 Maret 2009 "Geliat Parpol Nasionalis Menggarap Segmen Pemilih Muslim".
- M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1995.
- M. Dien Syamsuddin, "Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama: Mengikhtiarkan Wawasan sosial-Politik Baru", dalam Abdurrahman Wahid, dkk., *Muhammadiyah dan NU: Reorientasi Wawasan Keislaman*, Yunahar Ilyas, dkk. (ed.), Yogyakarta: LPPI UMY, LKPSM NU&PP Al-Muhsin, 1993.
- Mahdi Bahar, "Agama dan Kekuasaan", *Serambi Indonesia*, 6 Desember 2008.
- Moh. Soehadha, *Pengantar Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Silverman, David, *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text, and Interaction*, London: Sage Publication, 1993.

Suara Merdeka, 28 Juli 2007, "Dideklarasikan Bamusi dan BMI".

Turner, Ralp & Lewis Killian, *Collective Behavior*, New York: Prentice Hall, 1957.

Wawancara:

- Maskanah pada 2 Oktober 2010.
- Sudarto pada 2 Oktober 2010.
- Priyanto pada 8 Oktober 2010.
- Hari Asmara pada 8 Oktober 2010.
- Hariyadi pada 12 Oktober 2010.